KEYNOTE SPEECH MENTERI KEUANGAN RI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Jakarta, 22 Mei 2018

Yang saya hormati,

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, beserta jajarannya;
3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan beserta jajaran Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Kementerian / Lembaga yang terkait atau yang mewakili;
5. Para Duta Besar negara-negara sahabat atau yang mewakili;
6. Ketua dan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia ;
7. Ketua dan Pengurus Asosiasi Perasuransian di Indonesia;
8. Para Direksi Perusahaan Perasuransian dan para pelaku industri perasuransian; serta Para tamu undangan sekalian yang berbahagia.

Assalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Om Om Swastiastu, Namo Buddhaya

[Introduction]

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat sehat dan waktu untuk bisa berkumpul

dalam acara “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian”. Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan pada tanggal 18 April 2018 yang merupakan turunan dari UU UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan merupakan Undang-undang baru di Indonesia. Melakukan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua para pelaku usaha di bidang perasuransian di Indonesia dan dapat membawa kemajuan bagi industri perasuransian nasional, yang sekaligus juga merupakan mandat bagi kami ketika melakukan konsultasi dan pembahasan dengan DPR.

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kondisi perekonomian nasional terkini serta bagaimana Pemerintah terus bekerja keras untuk bisa menjaga kondisi dan situasi perekonomian dan dengan demikian diharapkan industri perasuransian dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu instrumen yang penting dalam pembangunan nasional. Hal ini mengingat kehadiran industri perasuransian merupakan bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena merupakan industri terbesar ke-2 setelah industri perbankan dalam sektor keuangan Indonesia. Oleh karena itu, saya akan memberikan update perekonomian Indonesia.

[Kondisi Perekonomian Indonesia]

Sebagaimana kita pahami bersama, kondisi perekonomian Indonesia sampai dengan bulan April tahun 2018 cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,06%, inflasi sebesar 3,4%, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 4,1%,

nilai tukar Rp13.631, meskipun kita ketahui bahwa gejolak terus dan masih berlangsung karena adanya perubahan global terutama kebijakan ekonomi kebijakan Federal Reserve America maupun kebijakan perdangan dan kebijakan fiskalnya. Dari sisi fiskal APBN kita mengalami perbaikan yang nyata dan signifikan, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 55,1 triliun atau 0,37% dari PDB, realisasi defisit ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian bulan April tahun lalu, hal ini menunjukkan APBN kita dalam situasi dan kondiis yang semakin baik dan sehat. Berdasarkan capaian tersebut, terutama dengan melihat trend penerimaan kita baik dari perpajakan dan penerimaan bukan pajak dan kinerja belanja negara maka kita mempunyai keyakinan bahwa defisit anggaran tahun ini bisa terjaga pada kisaran 2% sesuai dengan target yang ditetapkan oleh UU APBN.

Dari sisi fiskal, Pemerintah terus memperbaiki manajemen APBN sehingga tidak hanya kredibel, namun dia akan menjadi instrumen yang efektif dan aktif mengelola ekonomi Indonesia. Hal ini terutama dalam situasi hari-hari ini dimana banyak sekali pertanyaan apa yang akan dan bisa dilakukan oleh pemerintah dalam merespond kondisi ekonomi yang mengalami dampak dari kondisi global dampak *spill over* dari kondisi global terutama yang berasal dari Amerika. Usaha pemerintah untuk semakin memperkuat fondasi dan struktur ekonomi, dilakukan dengan berbagai cara, instrumen APBN kita gunakan secara selektif agar bisa mempengaruhi beberapa hal sesuai dengan kegunaan instrumen fiskal, karena instrumen fiskal berfungsi untuk stabilisasi, alokasi dan distribusi. Jadi APBN memang didesign untuk bisa meng-address

isu-isu yang sifatnya struktural, seperti kemiskinan, pemerataan, dan faktor fondasi ekonomi yang bisa memperbaiki dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Oleh karena itu kita menggunakan instrumen APBN baik dari sisi penerimaan seperti pajak didalam rangka untuk tidak hanya mengumpulkan uang untuk penerimaan negara, namun kita juga bisa aktif menggunakannya sebagai instrumen insentif terutama untuk menjaga ekonomi Indonesia dan memperbaiki strukturnya, kalau saat ini yang dianggap struktur yang masih perlu untuk diperbaiki adalah neraca pembayaran terutama dari sisi *current account* yaitu perbedaan antara ekspor dengan impor baik untuk barang dan jasa, oleh karena itu Pemerintah sekarang sedang akan segera mengeluarkan insentif perpajakan untuk terus mendukung kegiatan ekspor kita.

Sebetulnya ekspor kita pada kuartal satu tumbuh cukup tinggi di atas 9 persen, namun impor tumbuhnya lebih tinggi lagi yaitu mencapai diatas 30 persen dan inilah yang harus kita address karena pertumbuhan impor memang menunjukkan bahwa kita membutuhkan bahan baku dan barang modal artinya kalau kita ingin tumbuh tinggi pasti kemudian current account-nya mengalami tekanan kecuali kalau kita bisa mendorong ekspor sama cepatnya dan sama tingginya dengan pertumbuhan impor kita. Inilah yang akan kita lakukan terus menggunakan instrumen APBN fiskal namun juga dengan policy yang lain yaitu policy mengenai investasi, peraturan perundang-undangan, simplifikasi dan juga dari sisi pengurangan berbagai macam hambatan berbisnis. Seperti diketahui bahwa upaya Indonesia untuk

memperbaiki lingkungan bisnis dan investasi kita, sudah dikenal dan memiliki track record baik dalam tiga tahun terakhir peringkat kita naik 19 peringkat, dari 91 naik menjadi 72. Itu menggambarkan bahwa upaya kita akan terus dilakukan dan itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak hanya sesaat, tapi harus dijaga, Presiden juga sudah meminta seluruh Menteri untuk meluncurkan *single submission* untuk investasi dan ini diharapkan akan mempermudah dan memberikan pelayanan yang baik kepada para investor.

Kita juga sudah mendapatkan yang disebut peringkat Credit yang *Investment Grade* oleh kelima rating agency yaitu *Standard & Poor's (S&P), Moody's, Fitch, Japan Credit Rating Agency (JCRA),* dan *Rating and Investment Information, Inc (R&I)*. Ini adalah capaian-capaian yang baik namun tidak berarti kita berpuas diri, Pemerintah akan terus memperbaiki sehingga dengan demikian kita akan menumbuhkan: *Pertama* confidence, percaya bahwa ekonomi kita akan tetap bisa stabil dan tumbuh, karena *confidence* itu penting untuk dijaga terutama pada saat terjadi goncangan atau perubahan kebijakan yang signifikan. Yang tidak bisa kita kontrol tentu saja Kebijakan Ekonomi Amerika karena itu mereka negara merdeka mereka punya sendiri policy moneter, policy fiskal, yang tidak bisa kita control adalah *spillover* nya mereka dan policy-nya mereka, karena pasti akan mempengaruhi, yang bisa kita control adalah dampaknya terhadap *spillover* maupun policy itu terhadap ekonomi Indonesia. Kita akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mejaga *confidence* dan stabilitas meskipun kita sering harus memberikan ruang untuk perubahan atau penyesuaian. Karena kalau kita

bicara tentang menjaga ekonomi Indonesai tidak berarti itu sifatnya fix, tetapi dia menciptakan flexilibitas, sehingga penyesuaian/adjustment tetap bisa diwadahi didalam kerangka stabilitas. Ini yang mungkin saya akan terus menerus komunikasikan karena banyak mungkin dalam kondisi sekarang pergerakan rupiah yang dilihat oleh semua pihak setiap hari, masyarakat mengharakan setiap hari pemerintah mempunyai instrument untuk merespon. Dalam hal ini kita akan membuat suatu ukuran nilai tukar maupun stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta indikator pembangunan lainnya seperti kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja namun ada dalam suatu rentang pergerakan yang bisa tetap kita jaga, tidak berarti dia adalah *fix* namun dalam rentang yang memadai dan bisa kita jaga.

[Peranan Industri Asuransi dalam Perekonomian]

Sekarang kita masuk pada topik pagi hari ini, yaitu apa peranan Industri asuransi. Suatu perekenomian akan terus maju, dalam hal ini Indonesia sebagai negara tadinya low income, low middle income dan sekarang middle income country dan berharap dengan momentum pertumbuhan kita akan tetap bisa meningkatkan kondisi Indonesia yang lebih baik, maka kita pasti membutuhkan industri keuangan yang makin berkembang dan makin dalam karena tidak ada di negara manapun di dunia ada negara yang disebut high income country namun sektor keuangannya *underdeveloped*, itu tidak ada. Karena perkembangan sektor keuangan termasuk industri asuransi merupakan salah satu yang disebut *necessary condition* atau syarat yang perlu bagi suatu perekonomian yang semakin maju dan berkembang. Kenapa

ini terjadi karena masyarakat kita masuk dalam kelompok menengah, mereka masuk dalam kelompok *net safer*, mereka akan mencari instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Investasi yang bisa dalam bentuk tabungan pasif, mutual fund, insurance, atau dalam bentuk menyiapkan dana pensiun mereka dimasa yang akan datang. Mereka bisa membeli instrumen mulai dari corporate bond, government bond, exchange, stock exchange dan itu semuanya adalah variasi dari instrumen yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat mereka menempatkan dirinya dalam situasi dimana mereka memiliki peluang untuk berinvestasi karena adanya tabungan.

Saya mengharapkan tentu saja tidak hanya dari sisi masyarakat yang membutuhkan investment instrumen tapi juga sophistikasi dari perekonomian kita yang semakin mengharuskan industri asuransi menjadi berkembang. Kalau jaman dulu orang membeli produk asuransi kematian, itupun tidak secara sengaja kita membelinya karena kita membeli tiket disitu ada asuransi kematian dan kecelakaan jadi bukan by active kita membelinya. Kita membeli asuransi kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan nasional universal health cover, ini merupakan salah satu *back bone* yang harus kita perbaiki.

Namun juga industri yang dibutuhkan oleh masyarakat dari perusahaan yang juga semakin terdiversifikasi, ada total loss insurance yang kita masih perlu untuk kembangkan, Indonesia adalah negara yang sangat rawan terhadap bencana alam, kita bicara saja status erupsi merapi yang sudah meningkat, kita mesti melihat berapa banyak gunung berapi di Indonesia, kemudian kita

sering juga melihat adanya Tsunami atau *Hurricane* atau banjir dan juga dari sisi Earthquake atau gempa bumi.

Indonesia adalah negara yang secara geografis memang harus mampu untuk mengelola bencana, selama ini kalau ada bencana kita harus force langsung berasal dari pemerintah mengeluarkan APBN untuk membantu, namun seharusnya kita mampu untuk mengamankan industri asuransi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan perekonomian yang makin maju.

Kehadiran industri asuransi yang sehat, yang bisa menawarkan berbagai macam variasi produk, yang kompetitif, yang kredibel, tentu ini positif bagi masyarakat dan dunia usaha. Indonesia dalam hal tingkat penetrasi dan densitas asuransinya dibandingkan negara-negara ASEAN, kita masih tertinggal. Artinya dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 250 juta, penetrasi dan density asuransi kita, *among the lowest*, di ASEAN 5 terutama, dan ini menjadi PR kita semua, saya senang ada OJK dan asosiasi untuk bisa bersama-sama bagaimana mengembangkan asuransi yang baik.

Menciptakan suatu industri asuransi yang sehat dan kompetitif di dalam skala perekonomian nasional bahkan global perlu suatu permodalan yang kuat. Industri asuransi itu istilah bisnisnya adalah “main panjang”, modalnya tertanam dalam jangka panjang, membutuhkan suatu komitmen modal yang besar dan harus ditanamkan dalam jangka panjang, kalau mengharapkan untung yang cepat, maka tidak sesuai dengan industry asuransi. Ini salah satu hal yang kita perlu untuk terus sampaikan.

Selain modal besar dan komitmen jangka panjang, industri asuransi juga membutuhkan *skills* dari para pengelolanya yang *sophisticated* karena ini berhubungan dengan kemampuan modeling untuk menentukan berapa tingkat risiko dan harga dari risiko itu sehingga masyarakat/pembeli asuransi itu terproteksi namun perusahaan asuransinya juga tetap sustainable. Ini adalah sesuatu yang barangkali perlu untuk kita kembangkan, orang Indonesia banyak mengambil kuliah Akuntansi, tetapi asuransi bukan tentang akuntansi, bicara asuransi maka akan bicara tentang modeling risiko, oleh karena itu dibutuhkan lulusan ilmu matematika.

Transfer dari skills dan juga kemampuan kita untuk menarik modal asuransi dari luar negeri menjadi salah satu kunci pokok yang sangat penting. Kami di dalam menyusun PP ini telah melakukan konsultasi dengan industri, dan banyak pelaku industri dalam negeri mengakui bahwa mereka masih membutuhkan Transfer dari Skills, Knowledge, Experience dan tentu saja Commitment Model yang berasal dari luar Indonesia.

Dan ini adalah satu yang terus menerus menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Keberadaan dari mitra asing di dalam pengembangan industri perasuransian di Indonesia itu perlu, namun tidak berarti mereka bebas tidak terbatas. Oleh karena itu Pemerintah sesuai dengan spirit Undang-undang Asuransi mencoba untuk mengkombinasikan kebutuhan di satu sisi (membangun industri asuransi yang makin berkembang, makin dalam, dan komitmen modal serta skills yang bagus secara global) dan pelaku

domestik yang terus ditingkatkan kapasitasnya dan itu membutuhkan suatu proses jangka panjang.

Saya tentu berharap sosialisasi ini akan bisa dijadikan ajang bagi Kepala BKF beserta Tim yang menyusun PP ini yang telah dibahas dalam rapat konsultasi dengan DPR, OJK sebagai regulator dan yang mengawasi industri asuransi dan industri asuransi secara umum, sebetulnya secara simbolik ingin mengatakan bahwa ini ada suatu policy dari Pemerintah yang bisa dikomunikasikan kepada industri asuransi dari negara-negara yang lebih maju dan memiliki industri asuransi yang sudah advance untuk bisa melihat sebagai salah satu bentuk kesempatan.

Sebelum saya tutup, saya ingin mengatakan bahwa bagi kami membangun industri asuransi tidak hanya sekedar untuk kebutuhan diversifikasi instrument, *demand* permintaan masyarakat dan industri dan tingkat risiko yang dihadapi. Perkembangan industri asuransi yang dalam dan stabil dibutuhkan bagi Indonesia untuk ikut memecahkan masalah struktural kita yaitu *external balance*.

Setiap kali kita tumbuh, kebutuhan import kita tinggi dan terutama untuk *service account* (jasa) Indonesia masih negatif, artinya kalau kita tumbuh pasti muncul jasa keuangan termasuk asuransi, even kalau export kita tumbuh maka hal itu akan membutuhkan terutama jasa asuransi, bahkan import kita termasuk dalam bentuk jasa yang biasanya dalam bentuk asuransi.

Ini adalah sesuatu yang saya harapkan dengan pembangunan industri asuransi yang makin berkembang maka perkembangan industri asuransi yang

makin dalam dan makin advance akan bisa ikut memecahkan neraca pembayaran dari sektor jasa sehingga bisa berkontribusi positif dan membuat Indonesia lebih kuat fondasinya untuk tumbuh lebih tinggi secara sustainable.

[Edukasi dan Literasi]

Sebelum saya tutup, poin terakhir adalah edukasi dan inklusi sektor keuangan. Yang terpenting juga di dalam membangun industri asuransi adalah upaya kita untuk terus melakukan literasi atau pendidikan kepada masyarakat, tadi saya sampaikan penetrasi dan density dari asuransi di Indonesia adalah termasuk yang paling rendah atau paling dangkal, saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder ikut dalam membatu untuk melakukan edukasi dan meningkatkan keasadaran masyarakat di dalam memahami produk asuransi kemudian menjadi salah satu investor dari berbagai produk yang bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kalau jaman orang tua saya dulu, tidak memiliki asuransi baik kesehatan, pendidikan, asuransi nya adalah hanya doa terserah pada Tuhan saja. Sekarang doa harus tetap penting, tapi juga kemampuan kita untuk meng cover risiko bagi kita dan keluarga kita menjadi penting. Maka edukasi dan literasi itu penting, dan ini saya harapkan OJK, dari asosiasi untuk dapat melakukan secara terus menerus.

Saya tutup dengan mengatakan bahwa sewaktu Pemerintah menyusun PP ini pembahasan dengan Dewan berjalan cukup baik, Dewan juga menanyakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting kepada kami dan sebagai policy maker kita harus memilih, tapi saya juga ingin menshare

kepada anda bahwa PP 14 tahun 2018 tidak lahir secara innocence artinya ada yang disebut legacy status yang sudah muncul yaitu industri-industri yang waktu itu sudah ada di Indonesia atau bahkan pada saat krisis terjadi pada tahun 1997/1998, mereka kemudian mengalami kemerosotan dan partner asing melakukan banyak sekali injeksi modal, sehingga struktur dari industry asuransi kita banyak kepemilikan asing dengan struktur diatas 80 persen. Saya harap Kepala BKF dapat menjelaskan legacy status tesebut.

Karena kebetulan minggu-minggu ini kalau saudara lihat bahwa semua sedang melakukan bukan perayaan tapi sama-sama mengingat bahwa 20 tahun yang lalu Republik Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat, krisis ekonomi yang disebabkan oleh sektor keuangan yang rapuh waktu itu yaitu bank dan industri keuangan non-bank. Oleh karena itu banyak hal yang sebetulnya warisan legasi yang masih harus kita lakukan management atau pengelolaan hingga saat ini.

Saya tutup dengan mengatakan selamat melakukan kegiatan sosialiasi semoga waktu dan forum diskusi ini akan bisa memberikan banyak manfaat dalam bentuk informasi-informasi dan tentu saya berharap bahwa seluruh stakelholders akan ikut meningkatkan dan membangun industry asuransi yang kuat dan aman.

Terimakasih,

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Sri Mulyani Indrawati, MENTERI KEUANGAN RI